

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

PENDAMPINGAN KEGIATAN PUSAT DAN
PROVINSI BIDANG BINA USAHA DAN
PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN

DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk Memfasilitasi kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan yang ada di kabupaten Pesisir Selatan. Memfasilitasi Koperasi Perikanan dan Kelompok Pengolah dan Pemasaran (Poklahsar) hasil Perikanan dalam mengajukan proposal bantuan ke Pemerintah Pusat (KKP) dan Pemerintah Provinsi (DKP), melakukan monitoring bantuan Pemerintah Pusat (KKP) dan Pemerintah Provinsi (DKP) kepada Koperasi Perikanan dan Poklahsar yang telah menerima bantuan.

Fasilitasi Koperasi Perikanan dan Poklahsar dalam mengajukan proposal bantuan yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas usaha kelompok tersebut, sedangkan monitoring bantuan Koperasi Perikanan dan Poklahsar yaitu melihat pemanfaatan bantuan tahun sebelumnya dan bantuan tahun berjalan sehingga Koperasi Perikanan dan Poklahsar penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk pengembangan usahanya.

Landasan Hukum Pelaksanaan Kegiatan

1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/32/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
2. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: 523/05-KPTS/DISKAN-PS/II/2020 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Perikanan No.2.00.01.2.00.01.26.06.5.2 Tahun 2020

1.2 Tujuan

- a. Melakukan Monitoring dalam meningkatkan pemanfaatan bantuan yang diterima Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil (POKLASAR) Perikanan maupun pelaku usaha Perikanan yang telah menerima bantuan alat pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- b. Memberikan informasi kepada Poklahsar dan Pelaku usaha perikanan dalam susunan administrasi kelompok serta petunjuk mengajukan proposal sesuai kebutuhan untuk mendapatkan bantuan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Sasaran

Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR) hasil Kelautan dan Perikanan, dan Koperasi Perikanan.

1.4 Output

Tertibnya Administrasi dan Teknis kegiatan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi oleh Koperasi Perikanan dan Poklahsar hasil Kelautan dan Perikanan.

1.5 Out Come

1. Terlaksananya kegiatan Pusat dan Provinsi bidang Bina usaha dan pengelolaan hasil perikanan.
2. Termanfaatkannya bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi oleh kelompok penerima untuk pengembangan usahanya.
3. Adanya laporan hasil pemanfaatan bantuan oleh kelompok penerima.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Tabel.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Jadwal kegiatan											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Identifikasi dan Verifikasi Poklahsar/Koperasi calon penerima bantuan												
2	Pendampingan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi												
3	Monitoring Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi tahun sebelumnya dan tahun berjalan												

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan sudah dilaksanakan Identifikasi dan Verifikasi Poklahsar/Koperasi calon penerima bantuan chest freezer dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yaitu Koperasi Perikanan Suci Samudera dan Poklahsar Cita Rasa Lokan sesuai dengan proposal yang diajukan, sedangkan Monitoring Pemanfaatan Bantuan sudah dilakukan pada Kelompok Penerima bantuan chest Freezer dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada tahun 2019 yaitu Poklahsar Pengasapan bersama dan Poklahsar Kato Saiyo yang sudah memanfaatkan Bantuan tersebut dengan baik sesuai dengan kegunaannya.

Sehubungan dengan Pandemi Covid-19 kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dilakukan realokasi dan refocusing anggaran sehingga bantuan chest freezer dibatalkan pada tahun anggaran 2020, begitu juga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 sehingga Pelaksanaan kegiatan hanya terlaksana sampai bulan April 2020.

2.2 Realisasi Keuangan dan Fisik

Tabel. 2 Realisasi keuangan dan Fisik Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Pergeseran (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan	29.725.000	8.036.050	8.036.050	100	100

III. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

3.1 Permasalahan

1. Kurangnya kelengkapan administrasi kelompok untuk mengajukan bantuan Ke Pemerintah Pusat maupun provinsi
2. Kurangnya kreatifitas kelompok dalam pengembangan usahanya
3. Rendahnya sdm dalam pembuatan proposal bantuan
4. Rendahnya sdm dalam pembuatan laporan pemanfaatan bantuan
5. Minimnya Informasi bantuan dari pemerintah
6. Rendahnya keinginan dalam pengurusan Kelembagaan Kelompok

3.2 Pemecahan Masalah

1. Melakukan Pembinaan Kelompok secara berkesinambungan
2. Pemberdayaan dalam meningkatkan sdm Kelompok
3. Memberikan informasi kepada kelompok melalui penyuluh mengenai program bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan telah terlaksana dengan melakukan pembinaan dan monitoring kepada Koperasi Perikanan dan Kelompok Pengolah dan Pemasaran (Poklahsar) hasil Kelautan dan Perikanan dengan meningkatkan kelembagaan dalam bentuk badan hukum atau koperasi serta pembuatan laporan pemanfaatan bantuan. Beberapa Kelompok sudah melakukan pengurusan Badan Hukum dalam bentuk Akte notaris dan Koperasi dan sebagian yang belum berbadan hukum karena alasannya tidak adanya waktu biaya dalam pengurusan Koperasi atau akte notaris. Pembinaan, monitoring dan evaluasi sangat perlu dilakukan kepada Koperasi Perikanan dan Poklahsar yang menerima bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga bantuan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan dalam pengembangan usaha kelompok tersebut.

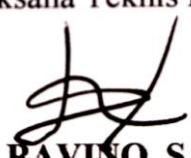
B. Saran

Untuk Koperasi Perikanan dan Poklahsar Hasil Kelautan dan Perikanan penerima bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi perlu melaksanakan :

- Memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan untuk peningkatan kapasitas usaha.
- Koordinasi dengan Penyuluh perikanan untuk Menyusun proposal bantuan sesuai dengan kebutuhan kelompok untuk pengembangan usaha.
- Koordinasi dengan penyuluh perikanan untuk menyusun analisa usaha kelompok sebelum memanfaatkan bantuan dan setelah memanfaatkan bantuan.
- Koordinasi dengan penyuluh perikanan untuk menyusun laporan hasil pemanfaatan bantuan setiap bulan.

Demikian laporan ini disampaikan, atas saran dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.


Kuasa Pengguna Anggaran,
Ir. GUSTRI DHARMA
NIP. 19630816 198908 1 01

Painan, Desember 2020
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DEKI RAVINO, S.Pt
NIP. 19841215 200902 1 005

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan

I. Dokumentasi Monitoring Pemanfaatan Bantuan Chest Frezer tahun 2019





II. Dokumentasi Monitoring Pemanfaatan Bantuan Ice Flake Machine (IFM) tahun 2019



